



Kerja Bersama Membangun Bangsa

Refleksi Perjalanan
45 Tahun Pengabdian
BKPM Bagi Indonesia



Daftar Isi

4	Kata Sambutan Kepala BKPM
—	
9	1 BKPM Dulu dan Sekarang
29	2 BKPM Sebagai Motor
	Pendorong Investasi di
	Indonesia
57	3 BKPM di Mata Mereka
—	
64	Daftar Pustaka

Kata Sambutan Kepala BKPM

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 1973, sebagai satu-satunya Lembaga Negara non-Departemen (LND) yang bertanggung jawab terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia. BKPM dibentuk untuk menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM)—sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA), yang dibentuk oleh Pemerintah sejak 1967. Dalam perjalanannya mengawal kegiatan penanaman modal Indonesia, BKPM telah mengalami beberapa perubahan nama, kewenangan, dan status kelembagaan, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pemerintahan, politik, dan sosial ekonomi dalam negeri dari masa ke masa.

Peranan BKPM, sebagai motor pendorong investasi Indonesia, sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan nasional, apalagi ketika kondisi pertumbuhan investasi di Indonesia, selama lima dekade ini, mengalami masa-masa naik dan turun akibat gejolak sosial politik dalam negeri dan kondisi perekonomian global. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat oleh Pemerintah untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPM terus berupaya menciptakan iklim investasi dan dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif untuk meningkatkan *capital inflow* demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BKPM juga tak segan melakukan beragam perubahan demi mencapai target yang telah ditetapkan, mulai dari merevisi berbagai undang undang yang berkaitan dengan bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan, sampai melakukan reorientasi dan restrukturisasi organisasi internal, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya jelas untuk mewujudkan Nawa Cita.

Untuk memperingati eksistensinya dari masa ke masa, BKPM merasa perlu memanfaatkan momen ini untuk menyusun sebuah buku yang merefleksikan perjalanan dan terobosan BKPM selama 45 tahun sebagai lembaga negara yang mengemban tugas sebagai motor pendorong investasi di Indonesia, yang penuh dengan dinamika.

Kami berharap buku ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi, yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan dan penanam modal di seluruh dunia, tentang Indonesia dan dinamika BKPM dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Selamat membaca!

Jakarta, September 2018

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Thomas Trikasih Lembong

45 tahun, dari waktu ke waktu

1973

Resmi dibentuk pada 26 Mei 1973 berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 1973, dengan status sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) dan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1980

BKPM resmi berkantor di Gedung BKPM di Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya berkantor di Jl Cut Mutia no.7, Jakarta Pusat.

2008

BKPM pertama kali menyelenggarakan program Investment Award dengan memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang investasi dan penyelenggara PTSP terbaik di tingkat kota, provinsi, dan kabupaten, di Indonesia.

KILN berubah nama menjadi Indonesia Investment Promotion Center (IIPC).

2007

Pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menggantikan UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968, yang menjadi landasan baru bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia.

2002

BKPM kembali membuka kantor perwakilan di luar negeri Kantor Investasi Luar Negeri (KILN), di Amerika Serikat dan Jepang.

2009

Website BKPM resmi diluncurkan dan menandai eksistensi BKPM di dunia maya.

2014

Perizinan online atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi berbasis Elektronik (SPIPISE) resmi diberlakukan oleh BKPM.

2015

Presiden RI Joko Widodo meresmikan fasilitas Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM.

2016

Thomas Trikasih Lembong resmi ditunjuk menjadi Kepala BKPM oleh Presiden Joko Widodo.

1983

BKPM membuka kantor perwakilan BKPM di beberapa negara, yaitu di Amerika (California dan New York), Perancis (Paris), dan Jerman (Frankfurt).

1985

BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan dipimpin oleh Menteri Muda Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau Ketua Badan Penanaman Modal.

1986

BKPM mengeluarkan kebijakan "Pelayanan Satu Atap/Pintu" (PSA/PSP), yang membebaskan calon penanam modal dari birokrasi di berbagai instansi pemerintah dalam mendapatkan persetujuan investasi.

2001

BKPM kembali menjadi LPND, yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

1999

BKPM berganti status menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

1992

BKPM kembali mengalami perubahan organisasi pada tahun 1992, ketika Kepala BKPM merangkap menjadi Menteri Negara Penggerak Dana Investasi.

1987

BKPM menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal.

2017

BKPM memiliki 2 website resmi, yaitu bkpm.go.id dan investindonesia.go.id.

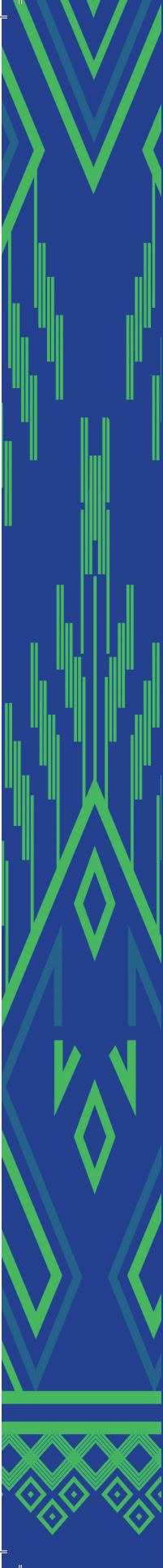
2018

BKPM tepat berusia 45 tahun menjadi Lembaga resmi negara yang bertugas menjaga aktivitas penanaman modal di Indonesia agar bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

2019

Pelayanan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau yang lebih dikenal dengan nama sistem *Online Single Submission* (OSS) dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mulai beroperasi pada 2 Januari 2019.





1

BKPM Dulu dan Sekarang

Sejak resmi menyandang nama BKPM, lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan status kelembagaan mengikuti dinamika politik dan pemerintahan.

Perubahan Nama dan Status

Ketika Pemerintah membuka pintu bagi masuknya investasi di Indonesia, maka lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab terkait bidang investasi pun dinilai penting untuk dibentuk. Presiden Indonesia kemudian mengeluarkan Dekrit Presidium Kabinet Nomor 17 Tahun dan mendirikan Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing—BPPMA (*Foreign Capital Investment Advisory Board*).

Setahun kemudian, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan mendirikan lembaga baru bernama Panitia Teknis Penanaman Modal (PTPM). Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 286 Tahun 1968, lembaga baru ini dibentuk untuk menggantikan BPPMA. PTPM membawahi 2 sub-panitia, yaitu Sub-Panitia Penanaman Modal Asing (PMA) dan Sub-Panitia Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Seiring perkembangan investasi di Indonesia, pada 26 Mei 1973, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 20 Tahun 1973, mengenai pembentukan lembaga baru, untuk menggantikan PTPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga ini berstatus non-departemen (Lembaga Pemerintah Non-Departemen/LPND) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada tahun 1985, dengan tetap berstatus LPND, BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan dipimpin oleh Menteri Muda Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri atau Ketua Badan Penanaman Modal, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita. Dua tahun kemudian, pada tahun 1987, BKPM menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal. BKPM kembali mengalami perubahan organisasi pada 1992, ketika Kepala BKPM merangkap menjadi Menteri Negara Penggerak Dana Investasi.

Pasca reformasi, Kabinet Pembangunan VII di masa Orde Baru dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Status kelembagaan BKPM dalam kabinet ini tidak mengalami perubahan. Dalam kurun waktu 1998-1999, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi yang merangkap sebagai Kepala BKPM mengalami pergantian hingga beberapa kali. Bahkan ada yang hanya bertugas selama satu minggu saja.

Pada 1999, BKPM berganti status menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Dan sejak 2002, BKPM kembali menjadi LPND, yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Perpindahan Lokasi Kantor

Sebelum berkantor pusat di Gedung BKPM di Jl. Gatot Subroto No. 44, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, BKPM pernah berkantor di Jl. Cut Mutia, Jakarta Pusat sejak 1967. Saat itu BKPM masih menyandang nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA).

Gedung, yang terletak di Jl. Cut Mutia No. 7 Jakarta Pusat, tersebut menampung seluruh karyawan PTPM yang berjumlah tidak lebih dari 50 orang. Menurut beberapa karyawan BKPM yang telah pensiun, karyawan bekerja di satu area kerja tanpa sekat dan pembatas. Karyawan yang berkantor di sana bertugas dan bertanggung jawab di bawah sub-komite Penanaman Modal Asing atau PTPMA. Sementara sub-komite Penanaman Modal Domestik atau PTPMD berkantor di Gedung Bapindo Jakarta.

Proses perpindahan dari kantor lama ke kantor baru membutuhkan waktu sekitar satu tahun. Persiapan dimulai sejak 1979, dan semuanya selesai pada 1980. Meskipun kantor baru masih membutuhkan beberapa pengembangan, namun semua proses kerja sudah resmi dilakukan di kantor yang baru.

Saat pertama kali pindah ke kantor baru, Gedung BKPM hanya terdiri dari satu gedung saja, yaitu yang saat ini bernama Gedung Barli Halim. Gedung kedua yang dibangun diberi nama Gedung Ismail Saleh, yang diresmikan dan digunakan pada 2004. Setelah



◀ Kantor BKPM resmi pindah dari Jl. Cut Mutia, Jakarta Pusat, ke Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tahun 1980. Saat pertama kali pindah ke kantor baru, Gedung BKPM hanya terdiri dari satu gedung saja, saat ini bernama Gedung Barli Halim.

itu, BKPM kembali membangun gedung baru, diberi nama Gedung Suhartoyo, yang diresmikan dan digunakan pada tahun 2008. Kompleks perkantoran BKPM kemudian dipercantik dengan beberapa taman (dimulai pada masa kepemimpinan Ismail Saleh) dan fasilitas umum lainnya, salah satunya Masjid Al Ihsan.

Saat ini, di dalam kompleks kantor BKPM, tidak hanya terdapat gedung perkantoran untuk karyawan bekerja, namun juga terdapat Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat. Presiden RI Joko Widodo meresmikan fasilitas ini pada Januari 2015. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi calon investor yang berniat untuk mengurus





◀ Tampilan eksterior Komplek Perkantoran BKPM yang sangat indah dan terawat, bahkan hingga sekarang, ini merupakan salah satu peninggalan Ismail Saleh, Kepala BKPM yang menjabat selama periode 1979-1981.

perizinan terkait kegiatan penanaman modal di Indonesia, yang bisa selesai hanya dalam hitungan jam saja. PTSP BKPM telah mendapat kewenangan dari 22 kementerian dan lembaga untuk dapat menerbitkan perizinan terkait kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Dinamika Kepemimpinan

Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli merupakan Kepala Tim Teknis Penanaman Modal Asing yang bertugas membantu kerja BPPMA—sebelum bernama PTPM dan kemudian menjadi BKPM. Ia menjabat sejak 1967 hingga 1973. Kepada pers, Prof. Sadli mengatakan bahwa ia merasa sudah waktunya ada pemimpin baru bagi BKPM setelah selama tujuh tahun ia mengepalai Lembaga tersebut.

Prof. Barli Halim, S.E., kemudian dipilih Presiden Soeharto untuk menjabat Kepala BKPM pada 1973. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang Wakil, yaitu Ir. A. R. Soehoed, dan lima orang Koordinator di bidang Hukum dan Ketenagakerjaan, Fasilitas Fiskal dan Moneter, Perizinan Domestik, Administrasi dan Kepegawaian, serta Promosi. Barli Halim merupakan salah satu kepala BKPM yang mengemukakan sistem “Indonesianisasi” untuk mengikat PMA sebagai partner Indonesia dalam sebuah hubungan *Joint Venture*. Menurutnya, kegiatan penanaman modal di Indonesia tidak boleh dikuasai oleh pihak asing.

Kepemimpinan Prof. Barli tidak sampai satu tahun di BKPM. Ia kemudian digantikan oleh wakil ketua BKPM.

Dr. Ir. Abdoel Raoef Soehoed diangkat menjadi Kepala BKPM pada 1973-1978. Di masa kepemimpinannya, BKPM tidak lagi menggunakan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai referensi perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, dan menggantinya dengan Daftar Skala Prioritas (DSP). Daftar ini resmi dikeluarkan oleh Pemerintah pada 15 Januari 1977, yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu Prioritas, Terbuka dengan Fasilitas, Terbuka Non Fasilitas, dan Tertutup.

Pada periode 1979-1981, BKPM dipimpin oleh **Ismail Saleh, S.H.** Di masa kepemimpinannya, BKPM menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan terkait penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri karena BKPM mendapatkan pelimpahan kewenangan atas pemberian izin usaha dari kementerian teknis terkait berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Menurut beberapa mantan karyawan BKPM, Ismail Saleh merupakan pemimpin yang sangat tertib administrasi. Pada masa kepemimpinan beliau, semua peraturan internal dan kepegawaian dibenahi secara signifikan, salah satunya penyediaan fasilitas perumahan bagi karyawan BKPM. Tak hanya itu, peninggalan lain dari Ismail Saleh semasa menjabat,

dan masih terawat hingga saat ini, adalah penataan taman di lingkungan kantor pusat BKPM yang sangat cantik dan indah.

Kepala BKPM berikutnya dijabat oleh **Ir. Suhartoyo** untuk periode 1982-1985. Di masa kepemimpinannya, Pemerintah mencabut fasilitas *Tax Holiday* dan beberapa fasilitas perbankan lainnya bagi penanam modal karena dinilai diskriminatif dan tidak memberikan dampak signifikan bagi pengembangan penanaman modal di Indonesia sesuai UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang resmi. Hal ini mengakibatkan iklim penanaman modal atau investasi di Indonesia mengalami kelesuan.

Untuk mendongkrak perbaikan iklim investasi di Indonesia, Ir. Suhartoyo memutuskan untuk semakin gencar melakukan promosi investasi di luar negeri, dengan mulai membuka kantor perwakilan BKPM di beberapa negara. California, Amerika Serikat, merupakan lokasi pertama kantor perwakilan BKPM dengan menempatkan satu orang konsultan. Setelah itu, promosi besar-besaran juga gencar dilakukan kantor perwakilan BKPM lainnya di Paris (Perancis), Frankfurt (Jerman), dan New York (Amerika Serikat). Saat itu, mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi bagi calon investor asing merupakan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat karena tujuan investasi utama di Asia masih dipegang oleh Singapura dan Thailand.

► Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, merupakan salah satu mantan Kepala BKPM yang melakukan terobosan yang strategis selama masa kepemimpinannya, yaitu "Pelayanan Satu Atap/Pintu" bagi penanam modal di Indonesia.



Pada 1985, BKPM bergabung dengan Kementerian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan dipimpin oleh Menteri Muda Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri/Ketua Badan Penanaman Modal, **Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**. Dua tahun kemudian, pada 1987, BKPM menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal.

Di masa kepemimpinannya, untuk meningkatkan efisiensi kegiatan promosi di luar negeri, BKPM menutup semua kantor perwakilan BKPM di luar negeri dan menarik perwakilannya kembali ke Indonesia. BKPM kemudian menjalin kerja sama dengan Departemen Luar Negeri sejak 1 Oktober 1985. Prof. Ginandjar memutuskan bahwa semua kegiatan promosi investasi di luar negeri dilaksanakan dengan menitipkan seorang perwakilan/konsultan BKPM di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara. Kegiatan promosi, salah satunya dengan melakukan pendekatan dan dialog dengan calon investor, selama tahun 1986, dilakukan

antara lain di Belanda, Jerman Barat, Kanada, dan Amerika Serikat.

Terobosan lain juga dilakukan oleh Prof. Ginandjar, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan paling strategis yaitu "pelayanan satu atap" atau "satu pintu" untuk penanaman modal. Calon penanam modal hanya perlu datang ke BKPM atau kantor BKPM di wilayah provinsi (BKPM Daerah) untuk mendapatkan izin investasi. Hal ini merupakan langkah raksasa karena membebaskan calon penanam modal dari birokrasi di berbagai instansi pemerintah dalam mendapatkan persetujuan investasi. Pelayanan satu pintu ini juga memudahkan penanam modal dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan investasi, regulasi, dan data.

Menurut beberapa mantan karyawan BKPM, Prof. Ginandjar dikenal sebagai pemimpin yang sangat gesit dan sangat ketat dalam hal pembaruan data. Ia meminta bawahannya untuk selalu siap dengan data terbaru sehingga siap setiap saat jika dibutuhkan

untuk pembuatan laporan atau presentasi. Bekerja hingga melewati jam kantor biasa bukan lagi hal yang asing bagi para karyawan saat itu. Meski begitu, mereka mengaku sangat bangga dengan kepemimpinan Prof. Ginandjar.

Ir. Sanyoto Sastrowardoyo kemudian diangkat menjadi Menteri Negara Penanaman Modal pada 1988 untuk menggantikan Prof. Ginandjar. Di masa kepemimpinannya, BKPM kembali mengalami perubahan status organisasi. Lembaga ini akhirnya berada di bawah Kementerian Negara dan dipimpin oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi sejak 1993.

Pada 1998, **Dr. Hamzah Haz** diangkat menjadi Menteri Negara Penanaman Modal. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, BKPM berganti menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Pascareformasi, kondisi sosial politik di Indonesia mengalami dinamika yang sangat cepat. Anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, cukup sering mengalami perubahan, termasuk pemimpin lembaga penanaman modal.

Drs. Marzuki Usman kemudian menggantikan Dr. Hamzah Haz. Sayang, masa kepemimpin

beliau sebagai Kepala BKPM hanya berusia 133 hari dan berakhir di tahun yang sama. Setelah itu, **Prof. Dr. Ir. Zuhul, M.Sc., EE.**, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, kemudian diangkat menjadi Menteri Kepala BKPM, sejak 1 Oktober 1999. Namun, 20 hari kemudian, masa jabatannya berakhir.

Pada 1999, BKPM berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dijabat oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, yaitu **Ir. Laksamana Sukardi**, sejak 26 Oktober 1999. Enam bulan kemudian, Ir. Laksamana Sukardi tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPM. Jabatan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara kemudian resmi dihapus. Pada 9 Agustus 2001, jabatan ini kembali dibuat dalam Kabinet Gotong Royong—berubah menjadi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan dijabat oleh Ir. Laksamana Sukardi hingga 2004.

Posisi sebagai Kepala BKPM kemudian diisi oleh **Drs. Rozy Munir S.** sejak 26 April hingga 23 Agustus 2000. Setelah Drs. Rozy, posisi kepala BKPM mengalami kekosongan selama hampir satu tahun. Pada 29 Juni 2001, Theo F. Toemion diangkat menjadi Kepala BKPM merangkap Menteri Negara Penanaman Modal/Investasi. BKPM kemudian

Setiap Kepala BKPM selalu memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi pengembangan lembaga ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dengan gaya kepemimpinan yang khas, mereka meninggalkan kenangan dan warisan budaya kerja yang berbeda di setiap masanya. Semuanya saling melengkapi dan memperkaya sejarah dan perjalanan lembaga ini selama 45 tahun.

kembali menjadi LPND. Kepala BKPM berada di bawah komando langsung dari Presiden dan wajib melapor serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di masa kepemimpinan Theo, BKPM kembali membuka kantor perwakilan di luar negeri, bernama Kantor Investasi Luar Negeri (KILN), di Amerika Serikat dan Jepang, pada akhir 2002, yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tujuannya adalah untuk menarik minat calon investor asing, terutama pengusaha kelas menengah, agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Ir. Yus'an, mantan Wakil Kepala BKPM periode 2009-2010, menceritakan gaya kepemimpinan Theo saat itu. "Pak Theo adalah pimpinan yang cukup keras dan bisa dikatakan galak. Meski begitu, Pak Theo itu sangat *fair*, jadi kalau dia memang salah, maka beliau tidak segan untuk minta maaf, meskipun kepada bawahan. Beliau juga sangat menghargai pendapat kita sebagai anak buahnya." Pada 16 Mei 2005, posisi Theo sebagai Kepala BKPM digantikan oleh **M. Lutfi**.

Saat M. Lutfi menjabat, Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menggantikan UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968. UU inilah yang kemudian menjadi landasan baru bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia, hingga saat ini.

Di tahun yang sama, Kantor Investasi Luar Negeri (KILN) berubah nama menjadi *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC).

"Pak Lutfi adalah pemimpin yang bagus. Di masa kepemimpinannya, beliau bisa tetap mempertahankan OSS (*One Stop Service*) berada dalam kewenangan BKPM. Hal ini sangat penting karena bisa mempengaruhi kelancaran proses investasi bagi investor dan tingkat kepuasan investor karena mereka cukup menjalani semua proses pendaftaran melalui satu lembaga saja, yaitu BKPM," jelas Yus'an.

M. Lutfi juga menggagas transformasi budaya kerja di lingkungan kantor BKPM untuk seluruh jajarannya, mulai dari pimpinan eselon satu sampai kepada seluruh staf. Perubahan ini adalah pengejawantahan dari reformasi birokrasi di lingkungan kantor pemerintah. Beberapa terobosan yang dilakukannya, antara lain adalah implementasi sistem informasi berbasis komputer (IT), penggantian logo BKPM, dan program *Investment Award*. Program ini adalah pemberian penghargaan bagi daerah-daerah yang berprestasi dalam bidang investasi dan penyelenggara PTSP terbaik di tingkat kota, provinsi, dan kabupaten, di Indonesia. Program ini diadakan setiap tahun sekali sejak pertama kali diluncurkan pada 2008. Pada 22 Oktober 2009, masa jabatan M. Lutfi sebagai Kepala BKPM pun berakhir.



Pelayanan Satu Atap (PSA), merupakan langkah raksasa karena membebaskan calon penanam modal dari birokrasi di berbagai instansi pemerintah dalam mendapatkan persetujuan investasi. PSA juga memudahkan investor dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru kebijakan, regulasi, dan data terkait investasi.

Gita Wirjawan kemudian menjadi Kepala BKPM untuk periode 2009-2012. Sebagai Kepala BKPM, Gita dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kelancaran komunikasi di antara semua anggota timnya. Semua deputi dan karyawan level menengah ke atas wajib memiliki telepon selular dengan teknologi yang paling terbaru. Tujuannya adalah agar tim bisa berkomunikasi lebih lancar, detail, cepat, dan terintegrasi.

Gita juga terkenal sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan bidang komunikasi dan publikasi. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran website BKPM yang baru pada akhir 2009. Tak hanya membenahi tampilan dan nuansanya, isi website yang baru ini juga lebih lengkap, detail, dan jelas. Peluncuran website baru ini menjadi salah satu milestone dalam perjalanan BKPM yang makin eksis merambah dunia digital. Tak hanya membenahi tampilan website, di masa kepemimpinan Gita, BKPM juga sangat aktif membenahi penampilan kantor untuk memberikan rasa nyaman bagi publik dan investor.

"Pak Gita termasuk pemimpin yang bagus, profesional, dan sangat memperhatikan penampilan kantor. Berkat beliau, kompleks gedung BKPM bisa sebagus dan seindah sekarang," tambah Yus'an.

Selain itu, dalam masa kepemimpinannya, Gita juga meluncurkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk memfasilitasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP). Sistem PTSP ini diresmikan dengan tujuan untuk memotong kerumitan birokrasi sehingga bisa mempercepat proses perizinan usaha bagi para investor. Tak hanya itu, Gita juga sangat memperhatikan kompetensi semua karyawan dan mendorong mereka agar bisa fasih berbahasa Inggris dalam kegiatan kerja sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya BKPM dalam meningkatkan kualitas layanan kepada publik dan investor. Masa kepemimpinan Gita sebagai Kepala BKPM berakhir pada 13 Juni 2012.

Posisi Kepala BKPM kemudian diisi oleh **M. Chatib Basri** hingga 1 Oktober 2013. Meski hanya dua tahun menjabat, Chatib merupakan salah satu pemimpin BKPM yang berpikiran maju dan inovatif. Beberapa terobosan yang dilakukannya, antara lain adalah membenahi sistem kerja pelayanan, baik internal maupun eksternal, dan media promosi milik BKPM.

Menurutnya, reformasi bisa merupakan hal sederhana dan berada di bawah kendali kita. Jadi, reformasi tidak perlu direpotkan oleh hal-hal besar, yang sampai membutuhkan persetujuan lembaga lain. Reformasi bisa dilakukan mulai dari dalam BKPM. Ia pun mulai melakukan perbaikan, dimulai dari website BKPM, yang harus *user friendly*. Ia tak segan untuk mengambil inspirasi dari website investasi milik negara Kosta Rika, yang berdasarkan survei merupakan website terbaik untuk bidang investasi.

▼
Ketua BKPM Gita Wirjawan di the University of New South Wales (UNSW) dalam rangkaian kegiatan Konferensi Australia Indonesia Business Council (AIBC), pada Maret 2011, sebagai upaya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia.



Setelah itu, ia juga membenahi layanan *hot-line* BKPM yang masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Untuk itu, ia membentuk divisi khusus untuk menangani perbaikan ini. BKPM kemudian mengirim para staf untuk mempelajari best practice untuk pelayanan *hotline* dari World Bank. Sri Mulyani, yang saat itu menjabat sebagai salah satu petinggi di World Bank memberikan banyak bantuan dan kemudahan dalam proses magang tersebut.

Setelah itu, Chatib juga memperbaiki internal *online tracking system*, agar investor bisa mengetahui sudah sejauh mana proses perizinan yang mereka ajukan dan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan sampai semua proses selesai. BKPM juga membuka semua jalur komunikasi bagi investor sebagai upaya untuk mengetahui respon dan tanggapan balik dari mereka terhadap kinerja BKPM. Semua itu merupakan cikal bakal dari *One Stop Service* yang sekarang ada di BKPM, yang semakin



▲ Acara peluncuran pelayanan online sebagai bentuk terobosan BKPM untuk meningkatkan pelayanan berupa perizinan online atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi berbasis Elektronik (SPIPISE).

▶ Sejak 2017, BKPM memiliki dua website resmi, yaitu bkpm.go.id dan investindonesia.go.id, dengan fokus penyajian informasi yang berbeda namun saling melengkapi.



hari semakin maju dan baik layanannya. Proses perizinan di BKPM juga kemudian dibuat sesuai dengan standar internasional (ISO).

Kepala BKPM berikutnya adalah **Mahendra Siregar**, yang menjabat sejak 1 Oktober 2013 hingga 27 November 2015. Dalam masa jabatannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan yang baru ini, disebutkan bahwa jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-Perizinan secara lengkap dan benar. Mahendra kemudian mengundurkan diri dari jabatan Kepala BKPM bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.

Pada 27 November 2014 hingga 27 Juli 2016, **Franky Sibarani** ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Kepala BKPM. Selama menjadi Kepala, terobosan yang dilakukan Franky Sibarani di antaranya adalah pemberlakuan perizinan *online* atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi berbasis Elektronik (SPIPISE) pada 15 Desember 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 26 Januari 2015, Layanan tiga Jam Perizinan Investasi pada 11 Januari 2016. Layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) pada 22 Februari 2016, dan Fasilitas Percepatan

Jalur Hijau, yang diluncurkan pada 11 Januari hingga 18 Juli 2016.

Pada 26 Juli 2006, **Thomas Trikasih Lembong**, biasa dipanggil Tom, resmi ditunjuk untuk menjabat Kepala BKPM. Sebelumnya, Tom adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak 12 Agustus 2015, menggantikan Rahmat Gobel.

Sebagai pemimpin, Tom sangat menyadari pentingnya kinerja pelayanan BKPM terhadap kebutuhan publik terkait penanaman modal, khususnya calon investor. Ia terus membenahi pelayanan di BKPM, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sejak dilantik menjadi Kepala BKPM, Tom sudah dipercaya untuk mengemban tugas langsung dari Presiden Joko Widodo agar bisa meningkatkan kinerja BKPM, mencapai target investasi yang sudah ditetapkan Pemerintah, dan turut mewujudkan Nawa Cita.

Menyadari perkembangan teknologi yang semakin tak terbendung, Tom selalu mengingatkan dan meminta segenap karyawan BKPM untuk selalu berpikir jauh untuk mengejar ketertinggalan dan lebih berorientasi digital dalam memberikan pelayanan investasi. Menurutnya, Indonesia harus mengejar ketertinggalan dengan negara lain yang sudah serba terkoneksi dan digital. Ia meminta semua kegiatan dapat terintegrasi secara digital agar bisa diakses daring.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan rasio realisasi

Menginjak era milenium dan sejalan dengan perkembangan teknologi, BKPM mulai merasa bahwa kehadiran website, sebagai salah satu media komunikasi dan promosi, sangat dibutuhkan oleh lembaga ini. Meski perencanaan sudah dimulai sejak 2002, tim khusus pengembangan website baru dibentuk pada tahun 2005.

investasi terhadap komitmen investasi yang masih sangat rendah, Tom melakukan reorientasi dan restrukturisasi organisasi BKPM pada pertengahan 2017. Menurutnya, langkah ini efektif dilakukan BKPM sebagai salah satu upaya untuk menjawab berbagai keluhan investor saat ini terhadap carut marutnya pelayanan investasi di daerah, di antaranya tidak adanya standarisasi jenis perizinan, lambatnya proses perizinan, rendahnya kompetensi aparatur daerah yang melayani perizinan dan seringnya mutasi aparatur atau pejabat di daerah. Reorientasi dan restrukturisasi ini diharapkan akan meningkatkan realisasi investasi di daerah serta memperkuat penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah ada di PTSP Pusat.

Reorientasi organisasi yang dilakukan berupa perubahan Kedeputian Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan kerja sama luar negeri menjadi berorientasi pada kegiatan kerja sama di dalam negeri, khususnya daerah. Reorientasi itu berdampak pada perlunya restrukturisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Restrukturisasi yang dilakukan BKPM difokuskan untuk membenahi pelayanan investasi di daerah, di antaranya adalah dengan membuat tiga direktorat. Pertama, Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan

standarisasi perizinan. Kedua, Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah. Ketiga, Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri. Untuk direktorat kedua, memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembinaan teknis, pemantauan, dan pengawasan. Sementara direktorat ketiga, akan mengurus kerja sama penanaman modal baik di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Eksis di Dunia Digital

Meski sudah terbentuk sejak 1967, sistem pengarsipan dokumen dan data-data di lembaga ini baru dibangun pada tahun 1980-an. Semua data-data yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal dikumpulkan dan disentralisasi. Sistem pelaporan bulanan pun mulai dibuat dan dilaksanakan secara tertib.

Karena beragamnya bentuk laporan yang diwajibkan berbagai instansi kepada para penanam modal, BKPM memprakarsai penyusunan bentuk laporan yang diseragamkan agar dapat dipakai oleh semua instansi di pusat dan di daerah. Prakarsa tersebut telah disampaikan dalam suatu pertemuan antar departemen pada 22 Agustus 1983. Penyeragaman ini dilakukan juga sebagai persiapan agar dapat diterima dalam Sistem Informasi Internasional.

Seiring perkembangan teknologi, semua data dan arsip milik BKPM mulai dikomputerisasi. Hal ini

► Sebagai pemimpin, Tom sangat menyadari pentingnya kinerja pelayanan BKPM terhadap kebutuhan publik terkait penanaman modal, khususnya calon investor. Ia terus membenahi pelayanan di BKPM, baik yang bersifat internal maupun eksternal.



untuk memudahkan pelacakan data dan dokumen antara BKPM dengan instansi terkait, antar karyawan BKPM, dan dengan para investor. Prosesnya tentu tidak sebentar dan membutuhkan inisiatif tinggi dari seluruh karyawan.

Pada fase awal, BKPM membuat *"Software Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal"*. Data awal yang dimasukkan ke dalam sistem adalah data persetujuan penanaman modal

(SPT) dengan berbagai macam bentuk keluaran. Untuk meningkatkan pengawasan proyek serta merintis ke arah Sistem Informasi Nasional, BKPM meningkatkan hubungan kerja/kerja sama dengan Departemen Perindustrian melalui kegiatan pertukaran data dan informasi ataupun hubungan *"Interchangeable"* antara komputer di BKPM dan Departemen Perindustrian. Di masa kepemimpinan M. Lutfi, BKPM semakin berbenah diri dengan

semakin gencar mengimplementasikan sistem informasi berbasis komputer (IT).

Menginjak era milenium dan sejalan dengan perkembangan teknologi, BKPM mulai merasa bahwa kehadiran website, sebagai salah satu media komunikasi dan promosi, sangat dibutuhkan oleh lembaga ini. Semua informasi yang terangkum di dalam website ini diharapkan bisa memudahkan publik dan calon investor, di mana pun berada, untuk memahami kegiatan penanaman modal dan peran BKPM dalam kegiatan tersebut. Meski perencanaan sudah dimulai sejak 2002, tim khusus pengembangan website baru dibentuk pada tahun 2005. Saat itu, server website BKPM masih berada di Amerika sehingga proses *loading* masih relatif lama. Tak lama kemudian, KILN juga membuat website sendiri yang terhubung dengan website BKPM.

Sejak 2017, BKPM memiliki 2 website resmi, yaitu bkpm.go.id dan investindonesia.go.id. Website bkpm.go.id berfokus pada penyajian informasi mengenai BKPM sebagai lembaga negara RI yang berwenang dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Sedangkan investindonesia.go.id berfokus pada penyajian informasi lengkap dan terbaru terkait kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Untuk memaksimalkan kualitas pelayanan perizinan di PTSP Pusat, pada 3 Juli 2017 BKPM melakukan inovasi layanan dalam bentuk digitalisasi penyelenggaraan layanan perizinan. Pada tahap

awal, inovasi ini dilakukan dengan menerapkan tanda tangan digital yang tersertifikasi (*Certified Digital Signature*) pada penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM), dengan format *Portable Document Format* (PDF), yang dilengkapi dengan Lembar Pengesahan. Pada tahap II akan dilakukan digitalisasi produk Izin Usaha (IU), yang saat ini masih dikoordinasikan dengan kementerian teknis sebagai pembina bidang usaha.

Sejak media sosial menjadi salah satu instrumen komunikasi dan promosi yang sangat penting di dunia, BKPM juga mulai aktif memanfaatkannya untuk membantu mengkomunikasikan kepada publik terkait tugas dan tanggung jawabnya serta kegiatan penanaman modal di negeri ini. Hingga saat ini, BKPM aktif ‘berbincang’ dengan publik melalui lima media sosialnya, yaitu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan LinkedIn. Semua media sosial ini dikelola secara profesional dan sesuai segmentasi masing-masing media. ☉



Kepala BKPM

1967-Sekarang



Prof. Dr. Ir. Moch. Sadli
1967–1973



Prof. Dr. Barli Halim
1973–1981



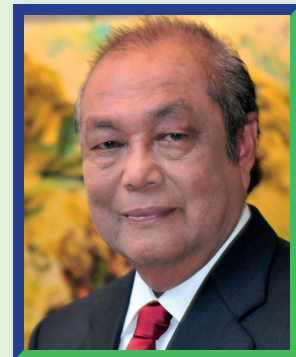
Ismail Saleh, S.H.
1981–1982



Dr. Hamzah Haz
1998–1999



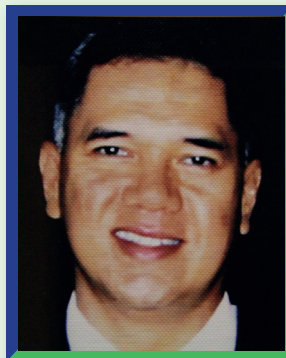
Drs. Marzuki Usman
1999–1999



Prof. Dr. Ir. Zuhair, M.Sc., E.E.
1999–1999



M. Lutfi
2005–2009



Gita Wirjawan
2009–2012



M. Chatib Basri
2012–2013



Ir. Suhartoyo
1982–1985



Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
1985–1988



Ir. Sanyoto Sastrowardoyo
1988–1998



Ir. Laksamana Sukardi
1999–2000



Drs. Rozy Munir S.
2000–2001



Theo Toemion
2001–2005



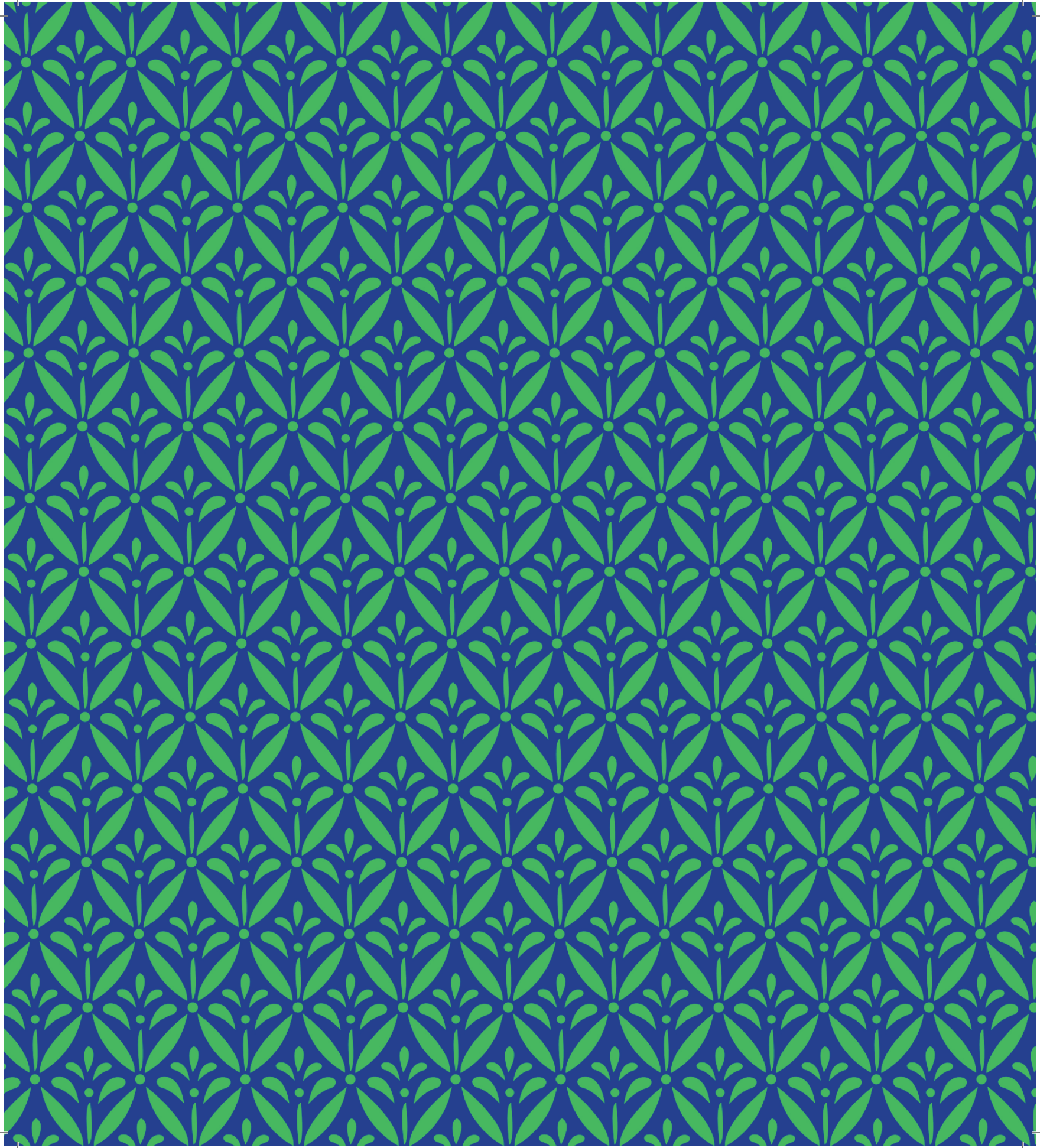
Mahendra Siregar
2013–2014



Franky Sibarani
2014–2016



Thomas Trikasih Lembong
2016–





2

BKPM Sebagai Motor Pendorong Investasi di Indonesia

A silhouette of a person wearing a hard hat and safety glasses stands with their hand on their hip, looking towards a surveying instrument mounted on a tripod. The scene is set against a vibrant sunset sky with a large, bright sun low on the horizon, creating a strong lens flare. In the background, the silhouettes of construction cranes are visible against the orange and yellow glow of the setting sun.

Meskipun mengalami beragam perubahan, secara garis besar, visi, dan misi BKPM tetap sama sejak dulu hingga saat ini, yaitu mempromosikan sektor investasi di Indonesia dan melayani para calon investor, baik asing maupun domestik.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Visi & Misi

Meskipun mengalami beragam perubahan, secara garis besar visi dan misi BKPM tetap sama sejak dulu hingga saat ini, yaitu mempromosikan sektor investasi di Indonesia dan melayani para investor yang ingin menanamkan modalnya di negara ini. Sesuai Peraturan Presiden RI nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dijelaskan bahwa tugas lembaga ini adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan

di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPM memiliki visi: Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan misi yang menggambarkan tujuan BKPM secara jelas dan fokus terhadap sasaran yang ingin dicapai ke depan.

Misi BKPM adalah:

- a. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
- b. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerja sama penanaman modal;
- c. Meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan advokasi pelaksanaan penanaman modal;
- d. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal.

Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai pada 2014, misi dan visi BKPM disesuaikan dengan visi dan misi Presiden, yaitu Nawa Cita (Sembilan Prioritas):

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai Lembaga Negara Non-Departemen, yang resmi dibentuk sesuai Keppres Nomor 20 tahun 1973, BKPM dipercaya untuk membantu Presiden Indonesia dalam merancang dan memformulasikan kebijakan dan regulasi penanaman modal, serta memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai aturan. Karena itu, Kepala BKPM melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada tahun 1977, Presiden mengeluarkan Keppres nomor 53 Tahun 1977 tentang BKPM dan perluasan tugas serta tanggung jawabnya, dan mencabut Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 1973. Pencabutan ini dipandang perlu untuk menyederhanakan sistem dan prosedur penanaman modal, termasuk tugas-tugas BKPM. Pada Pasal 2 Keppres tersebut, dinyatakan bahwa tugas utama BKPM adalah membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal,

pemrosesan persetujuan penanaman modal, dan penilaian pelaksanaannya. Berdasarkan hal itu, BKPM juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan antara penanaman modal dengan rencana kerja Pemerintah Indonesia di bidang infrastruktur perekonomian.

Seiring perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia, tugas dan tanggung jawab BKPM pun makin meluas. Untuk menyempurnakan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKPM, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1981 dan mencabut Keppres sebelumnya. Dalam Pasal 2 Keppres tersebut dinyatakan bahwa tugas BKPM adalah membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, menyelesaikan persetujuan penanaman modal, dan penilaian pelaksanaan penanaman modal maupun pengembangannya. Sesuai Keppres ini, BKPM memiliki tiga tugas pokok, yaitu menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) sebagai pedoman dan pengarahan Pemerintah terhadap kegiatan penanaman modal; Melaksanakan promosi melalui berbagai metode komunikasi di dalam negeri maupun luar negeri; dan memberi perizinan sebagai pelaksanaan dari sebagian kewenangan Menteri Teknis yang berhubungan dengan penanaman modal yang dilimpahkan kepada Ketua BKPM.

Pada tahun 1982, Pemerintah menetapkan perubahan tugas baru BKPM, sesuai Keppres Nomor 78 Tahun 1982. Jika dalam Keppres sebelumnya

Sebagai Lembaga Non-Departemen (LPND), Kepala BKPM bertanggung jawab langsung dan dipercaya untuk membantu Presiden Indonesia merancang dan memformulasikan kebijakan dan regulasi penanaman modal, serta memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai aturan.

BKPM diinstruksikan membuat dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas (DSP) secara teratur dengan berkolaborasi bersama beberapa departemen terkait, maka berdasarkan Keppres yang baru tersebut, BKPM menjadi satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas ini.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas BKPM, Pemerintah menilai perlu dilakukan peningkatan tugas BKPM dengan mengeluarkan Keppres nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BKPM. Sesuai Keppres tersebut, tugas BKPM adalah membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Yang menjadi titik berat tugas utama BKPM adalah pemberian pelayanan kepada penanam modal dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Di masa inilah, Kepala BKPM Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, mengeluarkan kebijakan paling strategis yaitu Pelayanan Satu Atap (PSA) atau pelayanan satu pintu (*One Stop Service/OSS*) untuk penanaman modal. Calon penanam modal hanya perlu datang ke BKPM atau kantor BKPM di wilayah provinsi (BKPM Daerah) untuk mendapatkan izin investasi. Hal ini merupakan langkah raksasa karena membebaskan calon penanam modal dari

birokrasi di berbagai instansi pemerintah dalam mendapatkan persetujuan investasi. Pelayanan satu pintu ini juga memudahkan penanam modal dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan investasi, regulasi, dan data.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas lembaga ini, Pemerintah memandang perlunya dilakukan penyempurnaan organisasi BKPM, yang disahkan melalui penerbitan Keputusan Presiden nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BKPM. Berdasarkan Keppres ini, BKPM mempunyai tugas pokok membantu dalam menetapkan kebijakan di bidang penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Tampuk kepemimpinan BKPM kemudian diserahkan kepada Menteri Investasi, sesuai Keputusan Presiden nomor 183 Tahun 1998, namun tugas dan tanggung jawab BKPM sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang menjadi fasilitator kegiatan penanaman modal di Indonesia, tidak mengalami perubahan yang signifikan. BKPM tetap bertugas melaksanakan pembangunan di bidang investasi langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

► BKPM merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, yang diberi mandat oleh Pemerintah untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.





Sejak dilantik pada Oktober 2014, Kepala BKPM sudah mengemban tugas dari Presiden RI, dengan tujuan untuk mencapai peningkatan daya saing bangsa Indonesia yang selaras dengan Program Nawa Cita dari pemerintah.



dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pentingnya pelayanan bagi calon investor di bidang penanaman modal membuat sistem PSA menjadi sangat penting untuk dibenahi. Pada 2004, sebagai salah satu upaya untuk menyederhanakan sistem PSA, Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Berdasarkan sistem PSA, maka pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal asing dan domestik, dipusatkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala LPND yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BKPM, serta menciptakan iklim

investasi yang kondusif, Pemerintah menilai perlu melakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi BKPM. Untuk itu, diterbitkanlah Peraturan Presiden nomor 90 Tahun 2007 tentang BKPM. Sesuai Perpres tersebut, BKPM mempunyai tugas utama melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat Presiden Joko Widodo mulai memegang tampuk pemerintahan, BKPM memiliki tiga tugas utama yang didelegasikan langsung dari Presiden. Sejak dilantik pada Oktober 2014, Kepala BKPM sudah mengemban tugas dari Presiden RI, dengan tujuan untuk mencapai peningkatan daya saing bangsa Indonesia yang selaras dengan Program Nawa Cita dari pemerintah. Tugas-tugas tersebut adalah:

1. Menyederhanakan Proses Perizinan Investasi
2. Membantu dan Memfasilitasi Proyek Investasi
3. Meningkatkan Hasil Investasi

Fungsi Kelembagaan

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, BKPM harus menyelenggarakan beberapa fungsi kelembagaannya. Hal ini ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan atau Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden RI, sebagai penerima laporan dan pertanggungjawaban langsung dari Kepala BKPM.

Berdasarkan Keppres nomor 20 tahun 1973, BKPM memiliki fungsi-fungsi antara lain: mempelajari dan mengevaluasi semua aplikasi penanaman modal (asing dan domestik) berdasarkan regulasi investasi dan kebijakan pembangunan yang berlaku di Indonesia, mengirimkan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden, mengkoordinasikan penerbitan izin dan semua keputusan dalam proses pendaftaran penanaman modal, memonitor pelaksanaan aplikasi penanaman modal yang sudah disetujui Presiden bersama departemen atau lembaga pemerintah yang terkait, menyediakan informasi mengenai kesempatan penanaman modal dan regulasi serta kebijakan pemerintah tentang program pembangunan negara, serta menangani permasalahan yang timbul akibat penerapan kebijakan penanaman modal dan menyediakan rekomendasi bagi Pemerintah mengenai cara mempercepat dan menjamin aplikasi penanaman modal serta pelaksanaannya.

Seiring diterbitkannya Keppres No. 53 Tahun 1977 tentang BKPM, Pemerintah melakukan penyesuaian fungsi-fungsi yang harus diselenggarakan BKPM dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menyusun DSP bersama departemen/lembaga pemerintah yang bersangkutan dan menerbitkannya, merumuskan kebijakan penanaman modal dan melaporkannya kepada Presiden, menilai permohonan penanaman modal dan meminta persetujuan Presiden, memberikan persetujuan permohonan penanaman modal, menerbitkan izin usaha atas nama Menteri teknis yang terkait, melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal, menyelenggarakan pembinaan penanaman modal, dan mengarahkan penyebaran kegiatan penanaman modal di daerah-daerah.

Empat tahun kemudian, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM, di mana di dalamnya diatur fungsi-fungsi penting yang harus dilakukan oleh BKPM dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal secara menyeluruh dan terpadu. Beberapa fungsi yang menjadi titik berat antara lain: melakukan koordinasi perencanaan penanaman modal dan mengadakan sinkronisasi rencana yang terpadu, menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan efektif dengan para penanam modal, dan memberikan pelayanan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan penanaman modal. Selain

Fungsi kelembagaan BKPM ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan atau Peraturan yang diterbitkan oleh Presiden RI, sebagai penerima laporan dan pertanggungjawaban langsung dari Kepala BKPM. Meskipun telah mengalami beberapa kali peraturan, yang ditetapkan oleh Presiden RI, hingga kini fungsi kelembagaan BKPM tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, fungsi kelembagaan BKPM mengacu pada Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2007 tentang BKPM.

itu, BKPM juga dipercaya untuk mengolah dan mengembangkan proyek-proyek yang diprioritaskan untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai waktu yang direncanakan.

Fungsi kerja BKPM tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan ketika Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden nomor 35 Tahun 1985. Satu fungsi BKPM yang ditambahkan dalam Keppres ini adalah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah dengan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) dan Departemen/Instansi yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah menginginkan adanya penyebaran dan pemerataan kegiatan penanaman modal di daerah-daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Fungsi BKPM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek penanaman modal di daerah pun makin ditingkatkan, sesuai Keputusan Presiden nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BKPM. Berdasarkan Keppres ini, BKPM tidak hanya melakukan pengawasan, namun juga mendapatkan kewenangan untuk memberikan sanksi bila terjadi penyimpangan dalam kegiatan penanaman modal di daerah. Seluruh fungsi ini tidak berubah meskipun tampuk kepemimpinan BKPM dialihkan oleh

Presiden kepada Menteri Negara Penggerak Dana Investasi pada 1993.

Seiring perkembangan kegiatan penanaman modal di daerah-daerah, fungsi BKPM sebagai koordinator kegiatan penanaman modal di Indonesia pun semakin diperkuat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi BKPM, selain fungsi-fungsi lainnya yang tertuang dalam Keppres sebelumnya, adalah menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta penggalangan potensi sumber daya nasional.

Pada tahun 1999, BKPM berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM-PBUMN). Dengan digabungkannya tugas pembinaan BUMN dengan BKPM, maka tugas dan fungsi BKPM mengalami perubahan total. Pertama, pengambilan keputusan terhadap permohonan PMA dan PMDN, yang semula melalui BKPM sebagai koordinator, setelah diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah, dikembalikan pada daerah masing-masing. Kedua, untuk pengajuan aplikasi PMA dapat dilakukan di KBRI negara asal PMA tersebut.

Pada 2001, status sebagai salah satu Lembaga Negara Non Departemen dikembalikan Pemerintah kepada BKPM, sesuai Keputusan Presiden nomor

103 tahun 2001. Keppres ini menekankan fungsi-fungsi BKPM, yaitu menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, melakukan koordinasi tidak hanya dalam pelaksanaan promosi penanaman modal, namun juga terkait kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya, memfasilitasi dan membina kegiatan instansi pemerintah di bidang penanaman modal, dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di berbagai bidang.

Selama enam tahun, fungsi kerja BKPM tidak mengalami perubahan signifikan, hingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 90 Tahun 2007 tentang BKPM. Sesuai Pasal 3 Keppres tersebut, saat ini BKPM menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





◀ Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha merupakan salah satu dari 14 tugas pokok BKPM, sesuai Peraturan Presiden nomor 90 Tahun 2007.

Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, BKPM memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Saat BKPM terbentuk sesuai Keputusan Presiden nomor 20 Tahun 1973, Kepala BKPM dibantu oleh seorang Wakil Kepala dan lima orang Koordinator di bidang Hukum dan Ketenagakerjaan, Fasilitas Fiskal dan Moneter, Perizinan Domestik, Administrasi dan Kepegawaian, serta Promosi.

Seiring perkembangan kegiatan penanaman modal di Indonesia, Pemerintah kemudian melakukan penyesuaian terhadap tugas, tanggung jawab, dan fungsi kerja BKPM. Pada tahun 1977, susunan organisasi BKPM mengalami perubahan, sesuai Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1977. Dalam melakukan tugasnya, Kepala BKPM dibantu oleh seorang Wakil Kepala, dua orang Deputi (Bidang Perencanaan dan Promosi, serta Bidang Penilaian dan Pelaksanaan), seorang Sekretariat Badan (setara Biro namun bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKPM), dan beberapa Biro. Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi membawahi dua orang Biro, yaitu Biro Perencanaan dan Pengembangan, serta Biro Promosi. Sementara, Deputi Bidang Penilaian dan Pelaksanaan membawahi Biro Penilaian Proyek, Biro Fasilitas dan Perizinan, dan Biro Pengendalian Pelaksanaan dan Pengawasan.

Susunan organisasi BKPM kembali mengalami perubahan, sesuai Keppres nomor 33 Tahun 1981 dan perluasan tugas serta tanggung jawab BKPM, yang tercantum di dalamnya. Bidang pengembangan dan promosi mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar. Untuk itu, BKPM menambah satu orang Deputi untuk Bidang Pengembangan dan Promosi, yang akan bekerja sama dengan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengendalian serta Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan.

Deputi Bidang Perencanaan membawahi Biro Perencanaan dan Biro Pengendalian dan Evaluasi. Sementara Deputi Bidang Pengembangan dan Promosi membawahi Biro Pengembangan, Biro Pembinaan dan Penyuluhan, dan Biro Promosi. Sedangkan Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan membawahi Biro Penilaian Proyek, Biro Fasilitas dan Perizinan, dan Biro Pelayanan Umum.

Sesuai Keppres nomor 35 Tahun 1985, tugas dan fungsi BKPM semakin ditingkatkan lagi terutama dengan menekankan peningkatan pemberian pelayanan kepada penanam modal dan menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Maka susunan organisasi BKPM pun mengalami pembaruan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala BKPM dibantu oleh seorang Wakil Kepala, tiga Deputi (Bidang Perencanaan dan Promosi, Bidang Penilaian dan Perizinan, dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan),

dan seorang Sekretariat Badan—setara Biro. Namun, pada organisasi baru ini dibentuk dua jabatan baru, yaitu Staf Ahli—setara Deputy dan Pusat Penelitian dan Pengolahan Data (PUSLITLAHTA)—setara Biro.

Deputi Bidang Perencanaan dan Promosi membawahi Biro Perencanaan dan Pengembangan serta Biro Promosi. Sementara Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan membawahi Biro Aplikasi dan Biro Perizinan dan Fasilitas. Sedangkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan membawahi lima orang Inspektur setara Kepala Biro.

Sesuai dengan dinamika penanaman modal di Indonesia dan peningkatan tugas serta tanggung jawab BKPM, maka susunan organisasi lembaga ini pun mengalami pengembangan. Sesuai Keputusan Presiden nomor 25 Tahun 1991, maka Kepala BKPM akan dibantu oleh seorang Wakil Ketua, seorang Sekretariat, lima Deputi, Staf Ahli, dan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA). Lima Deputi tersebut meliputi Deputi Bidang Perencanaan, Deputi Bidang Promosi, Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri, Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non Industri, dan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan.

Deputi Bidang Perencanaan membawahi tiga Biro, yaitu Biro Perencanaan Investasi Industri, Biro Perencanaan Investasi Non Industri, dan Biro Pengembangan Investasi. Sementara Deputi Bidang Promosi terdiri dari Biro Promosi Luar Negeri dan

Biro Promosi dan Kerja sama Investasi Luar Negeri. Tiga biro, yaitu Biro Penilaian Aplikasi Baru Bidang Industri, Biro Penilaian Aplikasi Perubahan Bidang Industri, dan Biro Perizinan dan Fasilitas Bidang Industri, berada di bawah Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Industri. Deputi Bidang Penelitian dan Perizinan Non Industri juga membawahi tiga biro, yaitu Biro Penilaian Aplikasi Baru Non Industri, Biro Penilaian Aplikasi Perubahan Bidang Non Industri, dan Biro Perizinan dan Fasilitas Bidang Non Industri. Sedangkan Deputi Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan terdiri dari Biro Pemantauan dan Evaluasi, Biro Pembinaan Pelaksanaan Investasi, dan Biro Pengawasan Investasi. Yang terakhir, yaitu Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan membawahi tiga biro, yaitu Biro Pemantauan dan Evaluasi, Biro Pembinaan Pelaksanaan Investasi, dan Biro Pengawasan Investasi.

Pada 1993, BKPM berada di bawah Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi, di mana menteri-nya sekaligus menjabat sebagai Kepala BKPM, sesuai Keputusan Presiden nomor 96/M Tahun 1993. Meski demikian, susunan organisasi BKPM tidak mengalami banyak perubahan. Baru lima tahun kemudian, sesuai Keputusan Presiden nomor 183 Tahun 1998, Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi berubah menjadi Kementerian Negara Investasi, dan susunan organisasi BKPM mengalami perubahan.

Sesuai Keppres tersebut, Kepala BKPM dibantu oleh seorang Sesmeneg/Sekut dan enam orang Deputi: Bidang Kerja sama Internasional dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Kebijakan dan Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, Bidang Pengembangan Usaha Nasional, dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Tiap Deputi dibantu oleh tiga orang Direktur.

Struktur organisasi BKPM ini tidak mengalami perubahan ketika Kementerian Negara Investasi kemudian berubah nama menjadi Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN pada tahun 1999. Susunan organisasi ini tetap tak berubah pada tahun 2001, ketika BKPM kembali menjadi Lembaga Negara Non Departemen sesuai Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001.

Enam tahun kemudian, susunan organisasi BKPM baru mengalami penyesuaian, seiring diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 90 Tahun 2007 tentang BKPM. Tujuan penerbitan Perpres ini adalah karena Pemerintah menilai perlu dilakukan reorganisasi dan revitalisasi organisasi BKPM untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sesuai Perpres 2007, Kepala BKPM akan dibantu oleh seorang Wakil Kepala, seorang Sekretariat Utama, enam Deputi, dan seorang Inspektorat. Enam

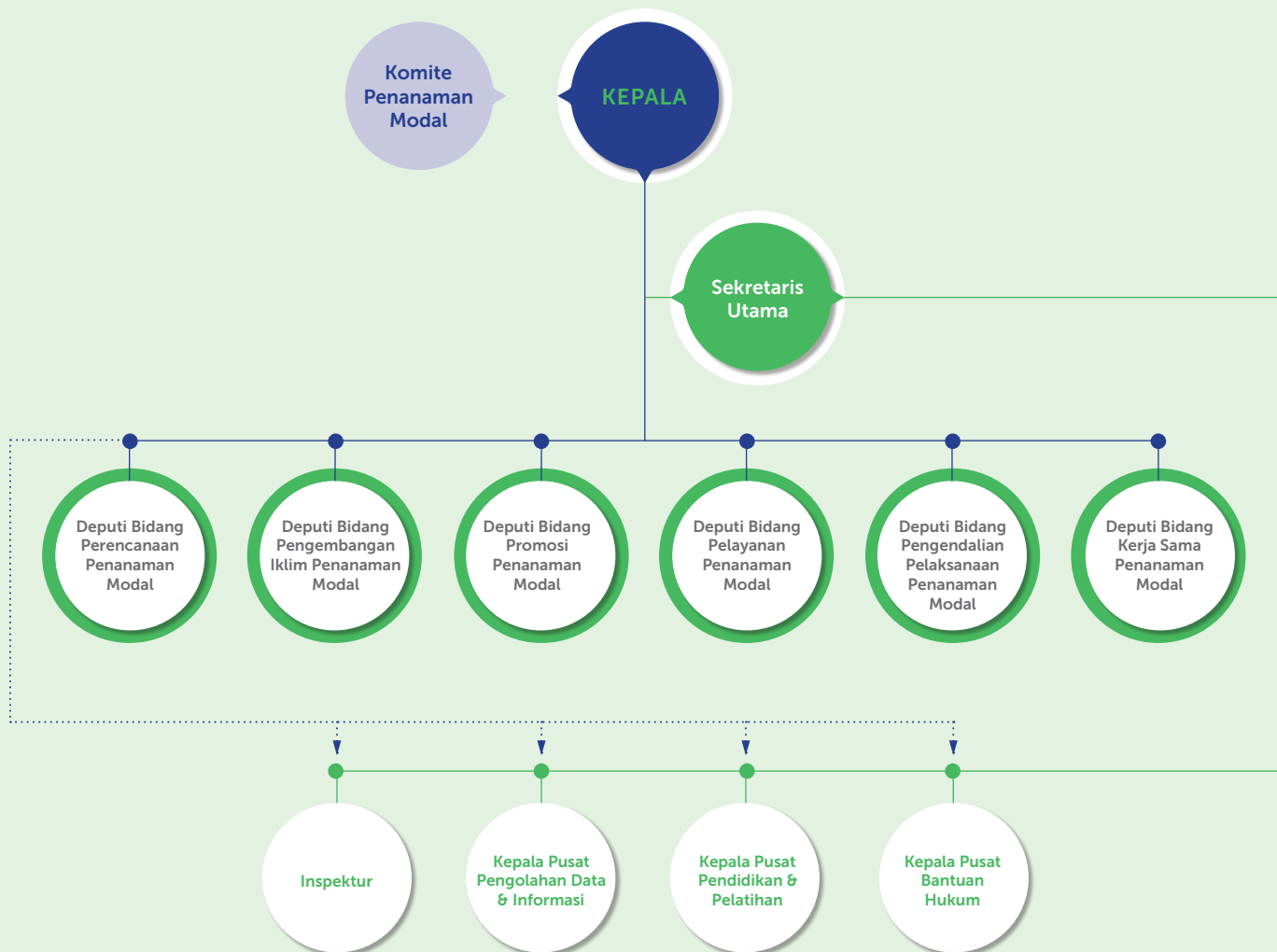
Deputi tersebut adalah Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Kerja sama Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Penanaman Modal, dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak tiga Biro, dan masing-masing Biro terdiri dari paling banyak empat Bagian. Deputi terdiri dari paling banyak empat Direktorat, dan masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak tiga Subdirektorat. Sedangkan Inspektorat terdiri dari satu Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Meskipun secara konstitusional posisi Wakil Kepala BKPM selalu ada, dalam praktiknya, ternyata tidak demikian. Ir. Yus'an, yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BKPM periode 2009 hingga Desember 2010, mengatakan bahwa hingga saat ini, ia merupakan WaKa BKPM yang terakhir. "Sejak saya pensiun pada akhir tahun 2010, sampai sekarang belum ada orang yang mengisi posisi Waka BKPM," ujarnya.

Saat ini, susunan organisasi BKPM adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI B K P M



Logo baru merefleksikan semangat BKPM dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta lebih berperan dalam usaha meningkatkan kemakmuran bangsa. Warna hijau pada logo merefleksikan keinginan BKPM untuk mendatangkan investasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sedangkan warna biru mencerminkan kemampuan BKPM dalam menjalankan tugasnya dalam mempromosikan peluang investasi di Indonesia.



1990an-2009



2009-sekarang

Makna di Balik Logo BKPM

BKPM merupakan Lembaga pemerintah, yang dibentuk sebagai penyelenggara administrasi kegiatan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, di Indonesia. Karena bertugas melayani kebutuhan publik, atau berorientasi publik, maka BKPM dituntut untuk selalu bisa bekerja secara profesional dan pro bisnis. Untuk menguatkan citra tersebut, BKPM kemudian menciptakan sebuah logo yang mencerminkan orientasi tersebut.

Sejak pertama kali berdiri dan mengalami beberapa kali perubahan nama, BKPM telah memiliki dan mengganti logo kelembagaannya sebanyak dua kali. Logo pertama diluncurkan pada era 1990-an. Logo tersebut diganti pada tahun 2008. Logo baru ini menekankan makna investasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, dan secara resmi diperkenalkan kepada publik oleh Kepala BKPM M. Lutfi pada acara *Investment Award 2008* di Jakarta.

“Logo baru ini merefleksikan semangat BKPM dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta lebih berperan dalam usaha meningkatkan kemakmuran bangsa.” Filosofi logo baru BKPM tersebut, menurut Lutfi, menyimbolkan tugas utama BKPM yaitu mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif untuk kesejahteraan bangsa.

Logo BKPM terdiri dari dua warna, yaitu hijau dan biru. Warna hijau merefleksikan keinginan BKPM untuk mendatangkan investasi yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan warna biru mencerminkan kemampuan BKPM dalam menjalankan tugasnya untuk mempromosikan peluang investasi di Indonesia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPM selalu melihat potensi dan kompetensi tiap karyawan dengan saksama. Lembaga ini tidak segan untuk memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri, atau mendapatkan beragam pelatihan terkait investasi. Bagi karyawan baru, biasanya akan menjalani proses magang atau ditempatkan di beberapa perusahaan, seperti Pertamina dan BNI, untuk belajar langsung di lapangan sehingga mereka bisa benar-benar memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai karyawan BKPM.

Sebagai mantan Sekretariat Umum dan Wakil Kepala BKPM, yang salah satu tugasnya adalah menangani administrasi dan kinerja internal serta pengembangan sumber daya manusia di BKPM, Yus'an mengatakan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi sejak dulu hingga kini adalah integritas dan loyalitas para karyawan. “Kesadaran utama yang harus dimiliki karyawan BKPM adalah bahwa BKPM

Sebelum bernama Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), kantor perwakilan BKPM di luar negeri bernama Kantor Investasi Luar Negeri (KILN). Perubahan nama ini terjadi pada 2007.

ada untuk melayani investor agar laju pertumbuhan investasi bisa meningkat bagi negara ini. Karyawan BKPM tidak hanya harus pintar secara kognitif tapi juga 'pintar' secara mental. Untuk bisa maju, mental dan integritas mutlak diperlukan tertanam dalam setiap karyawan BKPM. Seberapa baik kita bisa melayani investor akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu, saya sangat mencintai fungsi pelayanan, yang menjadi tanggung jawab dan tugas BKPM," ujarnya.

Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)

Untuk mendongkrak perbaikan iklim investasi di Indonesia, pada tahun 1982, Kepala BKPM Ir. Suhartoyo memutuskan untuk semakin gencar melakukan promosi investasi di luar negeri, dengan mulai membuka kantor perwakilan BKPM di beberapa negara. California, Amerika Serikat, merupakan lokasi pertama kantor perwakilan BKPM dengan menempatkan satu orang konsultan. Setelah itu, promosi besar-besaran juga gencar dilakukan kantor perwakilan BKPM lainnya di Paris (Perancis), Frankfurt (Jerman), dan New York (Amerika Serikat). Saat itu, mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi bagi calon investor asing merupakan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat karena tujuan investasi utama di Asia masih dipegang oleh Singapura dan Thailand.

Di masa kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, untuk meningkatkan efisiensi kegiatan promosi di luar negeri, BKPM menutup semua kantor perwakilan BKPM di luar negeri dan menarik perwakilannya kembali ke Indonesia. BKPM kemudian menjalin kerja sama dengan Departemen Luar Negeri sejak 1 Oktober 1985. Prof. Ginandjar memutuskan bahwa semua kegiatan promosi investasi di luar negeri dilaksanakan dengan menitipkan seorang perwakilan/konsultan BKPM di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di beberapa negara. Kegiatan promosi, salah satunya dengan melakukan pendekatan dan dialog dengan calon investor di Belanda, Jerman Barat, Kanada, dan Amerika Serikat, sangat giat dilakukan BKPM.

Di masa kepemimpinan Theo F. Toemion, BKPM kembali membuka kantor perwakilan di luar negeri, bernama Kantor Investasi Luar Negeri (KILN), di Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan, pada akhir 2002. Tujuannya adalah untuk menarik minat calon investor asing, terutama pengusaha kelas menengah, agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pada 2007, KILN resmi berganti nama menjadi Indonesia Investment Promotion Center (IIPC). Saat ini, IIPC terletak di London (UK), Tokyo (Jepang), Taipei (Taiwan), Sydney (Australia), Singapura (Singapura), Seoul (Korea Selatan), New York (Amerika Serikat), dan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab).



▲ Untuk mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia, sejak 1982, BKPM semakin gencar melakukan promosi investasi di luar negeri, dengan membuka kantor perwakilan BKPM di beberapa negara.

IIPC memiliki dua tugas utama, yaitu meningkatkan penanaman modal dari Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja ke Indonesia dan memfasilitasi penanaman modal dari Indonesia ke Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja.

Sebagai perwakilan BKPM di luar negeri, IIPC memiliki fungsi, antara lain:

1. Melakukan kegiatan pemasaran dan memberikan informasi penanaman modal secara proaktif dan terfokus;

2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan pemasaran penanaman modal dengan Perwakilan RI, lembaga terkait di Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja, serta instansi Pemerintah dan dunia usaha di Indonesia;
3. Memfasilitasi pengiriman misi penanaman modal dari Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja ke Indonesia dan penerimaan misi penanaman modal dari Indonesia ke Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja;
4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal baik bagi investor baru maupun yang sudah ada serta mendorong realisasi penanaman modal dari Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari BKPM;
5. Melaksanakan pemantauan minat penanaman modal dan kebijakan penanaman modal di Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja;
6. Memfasilitasi penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja;
7. Mengusulkan program kerja dan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian target investasi yang ditetapkan oleh Pimpinan BKPM;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BKPM dan Kepala Perwakilan WI di Negara Tempat Kedudukan.



**Kantor
Indonesia
Investment
Promotion
Center
(IIPC).**







Salah satu fungsi dari IIPC adalah mendorong realisasi penanaman modal dari Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari BKPM.

Penghargaan

Sebagai motor utama deregulasi pemerintah dan promotor investasi RI, serta pengidentifikasi investasi terbesar yang selama ini masuk ke Indonesia, BKPM telah berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan yang membanggakan, tidak hanya oleh Lembaga-lembaga di Indonesia, namun juga Lembaga-lembaga dari luar negeri, antara lain:

- **2017**—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi BKPM 74,23 dengan kategori “BB”.
- **2016**—Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada BKPM atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan selama 5 (lima) Tahun berturut-turut untuk Tahun Anggaran 2011-2015.
- **2016**—Standard and Poor’s memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BB+ (positive)*.
- **2016**—Japan Credit Rating Agency Ltd. memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BBB (stable)*.
- **2016**—Moody’s Investor Service memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook Baa3 (stable)*.
- **2016**—Rating and Investment Information Inc. memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BBB-*.

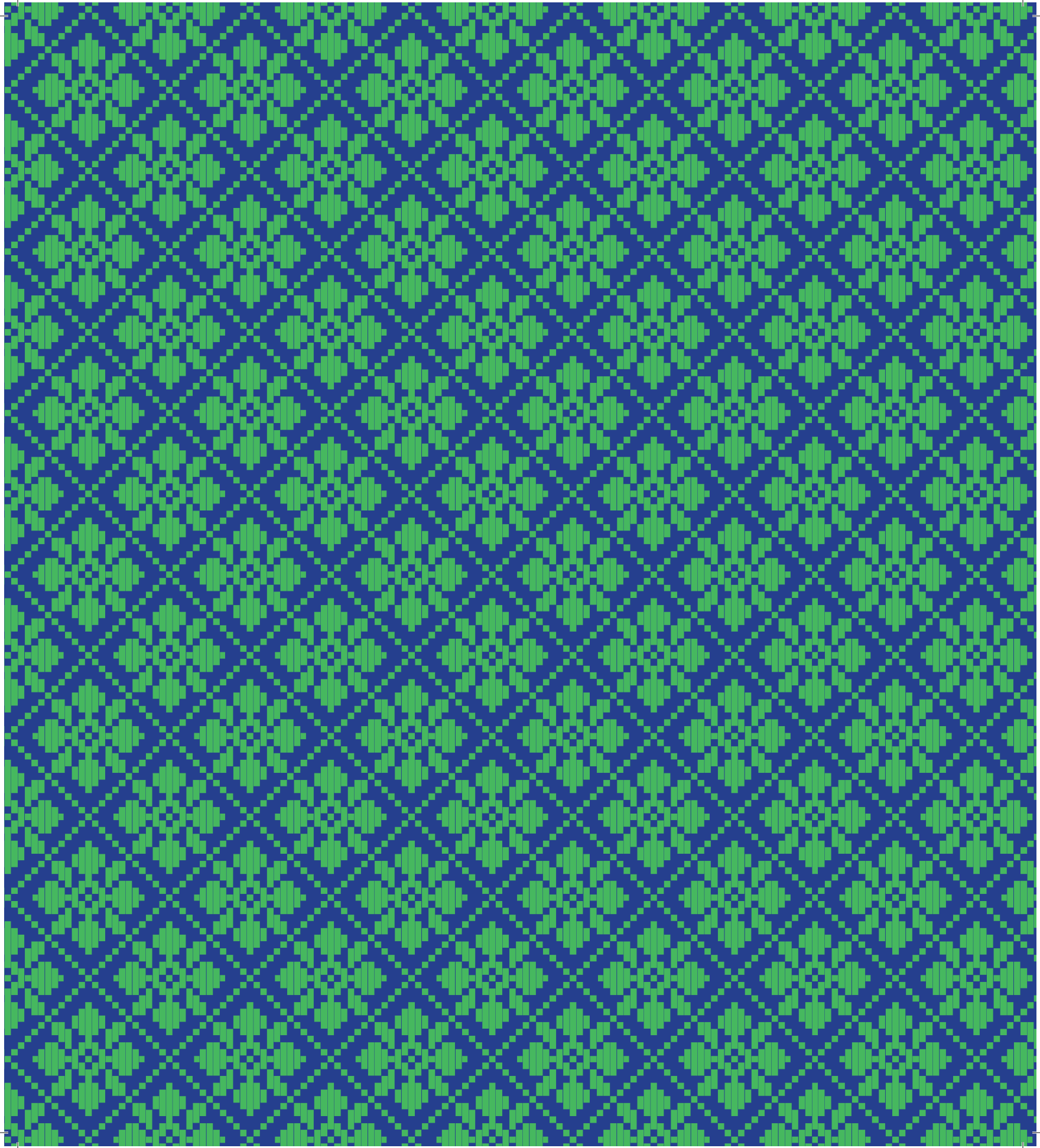


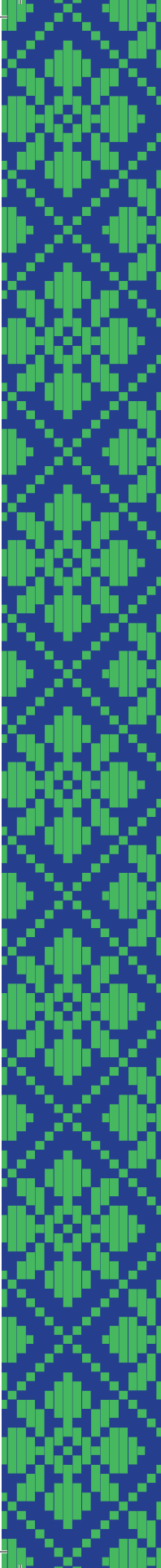
- **2016**—Lembaga Administrasi Negara memberikan penghargaan kepada Pusdiklat BKPM sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal
- **2016**—Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada BKPM atas Kontribusi dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- **2016**—Sucofindo International Certification Services memberikan Sertifikat SNI ISO 9001:2008 *Quality Management Systems-Requirements*. Berlaku sejak 5 September 2016 sampai dengan 14 September 2018.
- **2016**—Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada BKPM atas Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan Peringkat ke-6, Nilai rata-rata 100 pada Zona Kepatuhan Hijau.
- **2016**—Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan penghargaan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Pemenang Terbaik Ketiga pada tahun 2016 dalam Kategori Perencanaan Kepegawaian tingkat Kementerian/Lembaga.
- **2015**—Penyelenggara Jak Invest Expo 2015 memberikan penghargaan kepada BKPM sebagai Stand Terbaik pada Jak Invest Expo 2015: Pameran Peluang Investasi dan Produk Unggulan Daerah 2015.
- **2015**—Penyelenggara Indonesia Electricity Show (ICS) 2015 memberikan penghargaan kepada BKPM sebagai Stand Favorit pada Indonesia Electricity Show (ICS) 2015.
- **2015**—An. Pemerintah RI, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada BKPM atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan TA. 2014 dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah.
- **2015**—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada BKPM atas Predikat BB (Sangat Baik) Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015.



Doc. © Iwan Afwan/Marine Traffic

- **2015**—Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada BKPM atas Peran Serta BKPM terkait Pengumpulan Pajak.
- **2015**—Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BKPM TA. 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- **2015**—Standard and Poor's memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BB+ (positive)*.
- **2015**—Fitch Rating memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BBB (stable)*.
- **2015**—Japan Credit Rating Agency Ltd. memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BBB (stable)*.
- **2015**—Moody's Investor Service memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook Baa3 (stable)*.
- **2015**—Rating and Investment Information Inc. memberikan Predikat *investment grade* dengan *outlook BBB*.
- **2014**—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan BKPM nilai 71,03 atau dengan predikat penilaian "B" atas Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- **2014**—BKPM meraih peringkat ke-6 situs terbaik dalam Penghargaan *e-Transparency Award* dari 47 Kementerian/Lembaga.
- **2014**—Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada BKPM atas Peringkat Pertama Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap sarana dan prasarana tingkat Kementerian/Lembaga.
- **2014**—Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada BKPM atas Peringkat ke-2 Survei Integritas KPK Tingkat Pusat.
- **2014**—Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan BKPM nilai 62,70 kategori "B" dengan perbaikan atas Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. ☉





3

BKPM

di Mata Mereka

Dalam kurun waktu 45 tahun sejak resmi berdiri dan menyanggah nama BKPM, Lembaga ini sudah melakukan beragam inovasi dan terobosan demi tercapainya visi yang sudah digariskan oleh Undang Undang, yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional. Perjalanan panjang BKPM terekam dengan jelas dan penuh kebanggaan dalam catatan kehidupan dan karier para karyawan, serta dalam dinamika bisnis para kolega.



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Kepala BKPM 1985–1988

Untuk ke depan, BKPM harus semakin mawas diri dan jangan berhenti berinovasi dan membuat terobosan baru. Di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, di mana semuanya sudah serba digital dan elektronik, sehingga kondisi sudah semakin kompleks, BKPM harus mampu menjadi Lembaga negara yang benar-benar berkontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan nasional. BKPM berkejaran dengan waktu, maka sebaiknya BKPM bekerja dengan lebih optimal untuk membantu pemerintah mencapai percepatan pembangunan melalui investasi. Mungkin saat ini BKPM tidak lagi memegang kepentingan dalam semua perizinan, tetapi BKPM harus bisa lebih berperan dalam hal kebijakan. Jadi ke depannya BKPM lebih berperan dalam hal penyedia informasi seputar investasi di Indonesia bagi para investor, merumuskan kebijakan sesuai target pembangunan nasional, memonitor pergerakan investasi di Indonesia, serta memberikan arahan bagi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.



M. Chatib Basri

Kepala BKPM 2012–2013

Yang harus diingat oleh BKPM adalah kalau BKPM bisa semakin menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan investasi di Indonesia, maka pertumbuhan investasi di Indonesia pasti akan meningkat pesat. Jangan pernah berhenti berinovasi dan mereformasi diri sendiri agar bisa memberikan layanan yang baik bagi para investor. Mulailah reformasi dari internal BKPM sendiri, karena itu yang paling mudah untuk dilakukan tanpa campur tangan lembaga lain. Manfaatkan *user experience*, karena itu sangat penting, untuk menciptakan suasana dan iklim yang lebih nyaman dan menarik bagi investor. Ingatlah bahwa BKPM merupakan salah satu perwakilan wajah Indonesia di mata dunia. Dengan begitu, BKPM akan memiliki kontribusi yang besar bagi kesuksesan pembangunan di Indonesia. Saya sangat bangga pernah menjadi bagian dari BKPM karena saya benar-benar merasakan semangat dari tim BKPM, yang tidak terlalu besar untuk ukuran sebuah lembaga negara, untuk melakukan perubahan dan reformasi demi perbaikan layanan kepada publik. Selamat ulang tahun BKPM, terus bekerja dan berkarya agar investasi di Indonesia bisa terus meningkat demi kesuksesan pembangunan nasional.



Ir. Yus'an

Wakil Kepala BKPM 2009–2010

Saya sangat bangga dan mencintai karir di BKPM karena saya sangat suka fungsi pelayanan, sebagai salah satu tugas BKPM. Karena seberapa bagus dan baik kita melayani investor itu akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Coba saja bandingkan dengan negara tetangga, sampai saat ini Indonesia masih kalah dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dsb. Semua karena lembaga seperti BKPM di negara-negara tersebut sangat menyadari dan bekerja sepenuhnya agar laju investasi bisa lancar dan meningkat masuk ke negaranya. Dulu, Vietnam bahkan pernah belajar dari kita tentang cara kerja BKPM, tapi coba sekarang lihat negara itu, sudah sangat maju, lebih maju daripada Indonesia. semua karena mental dan integritas manusianya. Dan sampai saat ini, saya melihat hal ini masih menjadi tantangan bagi bangsa kita, termasuk BKPM. Perbaiki mental dan integritas manusianya, baru kita bisa berkembang dan maju.

Selamat ulang tahun BKPM, semoga selalu sukses dalam berbakti pada bangsa dan negara.

Suhat Miyarso *Direktur PT Chandra Asri*

Secara umum, transformasi dalam sistem pelayanan BKPM sepanjang dua tahun ini sudah sangat kami rasakan manfaatnya. Sebagai investor, kami beranggapan bahwa usaha perbaikan ini sudah membawa hasil yang baik. Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BKPM. Menurut kami, ada baiknya jika BKPM melakukan lebih banyak *benchmarking* dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju, misalnya studi banding dengan perizinan online di luar negeri.

Moon Hyung Joo *Presiden Direktur PT Nesia Pan Pacific*

Sekarang BKPM sudah melakukan banyak perbaikan dan perubahan yang sangat baik. Proses pengurusan perizinan sekarang bisa selesai dalam dua minggu saja. Memang masih banyak masalah yang harus dibenahi di Indonesia, tapi kami tetap optimis bahwa di masa depan akan semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia. Hal lain yang sangat kami apresiasi adalah semangat dan antusiasme karyawan BKPM, yang tidak hanya membantu proses pengurusan dokumen saja, tetapi juga terjun memberikan dukungan di lapangan.

Anne Patricia Sutanto *Eco Smart Garment Indonesia (ESGI)*

Bagi kami, saat ini BKPM sudah sangat mendukung semua investasi baru dan mengayomi investasi yang sudah ada. Dengan dukungan BKPM, kami bisa bersinergi dengan sekolah madrasah dan pesantren, sebagai penyedia sumber daya investasi, dalam program “Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Sinergi Investasi dan Pesantren” untuk mendukung tercapainya realisasi investasi. Untuk menghadapi masih banyaknya kendala dalam berinvestasi di daerah, saran kami adalah BKPM Pusat bisa berkoordinasi dengan BKPM Daerah untuk memudahkan proses investasi di daerah tersebut. Di sisi lain, BKPM sebagai pemilik data investor, dapat menganalisis daerah-daerah yang kinerjanya lambat agar bisa diberikan perhatian lebih dalam upaya pembenahannya.

Retno Sulistiono *Karyawan BKPM 1980–2007*

Bekerja di BKPM memberikan banyak pengalaman dan kenangan. Dimulai dari tim kerja yang kecil atau tidak terlalu besar, saya merasa suasana kerja sangat menyenangkan dan banyak bisa mempelajari hal-hal baru. Saya merasa sangat bangga pernah menjadi bagian dari BKPM dan turut berpartisipasi dalam perkembangan Lembaga ini.

Sukartini Karyawan BKPM 1969–2007

Ketika bergabung dengan BKPM, saya merasa tertantang untuk bisa memberikan kinerja terbaik karena Lembaga ini masih baru sehingga banyak sekali sistem yang belum terbentuk, timnya masih sedikit, namun tantangan dan target kerjanya sangat tinggi. Sangat menikmati karier saya di BKPM karena selalu banyak hal baru yang bisa saya pelajari dan target baru yang harus saya penuhi. Menurut saya, BKPM tetap merupakan Lembaga yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional sejak dulu. Dan saya sangat bangga pernah menjadi bagian dan perjalanan BKPM.

Irwan Karyawan BKPM 1976–2005

Banyak pengalaman unik dan menarik yang saya alami selama menjadi karyawan BKPM. Masih minimnya teknologi dan sistem komunikasi menjadi beberapa tantangan yang harus saya hadapi dan carikan solusinya agar target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Menurut saya, sampai kapan pun, peran BKPM sangat penting karena karena menjadi motor penggerak investasi di Indonesia.

Beni Karyawan BKPM 1976–2008

Bergabung menjadi karyawan BKPM memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya. Banyak tantangan dan pengalaman baru yang saya dapatkan selama berkarier di BKPM. Saya termasuk salah satu orang yang tergabung dalam tim perintis adanya website BKPM. Tidak seperti sekarang, di mana teknologi dan dunia digital sudah sangat maju, dulu banyak sekali kendala yang saya hadapi saat mempersiapkan website BKPM yang pertama. Saya merasa bangga pernah menjadi karyawan BKPM sejak Lembaga ini masih memiliki tim kecil dan kerja yang belum terstandar.

Daftra Pustaka

A. Buku dan Majalah

1. Investment Coordinating Board (BKPM). 1992. *25 Years of Investment: A Brief History of Investment Development in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Investment-Republic of Indonesia.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2016. *Build Indonesia: 750 Hari Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
3. Kartasasmita, Ginandjar. 2014. *Manajemen Transformasi Indonesia: Suatu Penuturan Jejak Sejarah*. Jakarta: Lembaga Management Fakultas Universitas Indonesia.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 1984. *Peranan BKPM dan Kebijaksanaan Penanaman Modal*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2018. *Penanaman Modal Dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
6. Tim Dokumentasi Presiden RI. 2003. *Jejak Langkah Pak Harto 01 Oktober 1965–27 Maret 1968*. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.
7. Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
8. Hamid, Edy Suandi. 2004. *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

B. Dokumen Resmi Milik Negara

1. Republik Indonesia. 1967. Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lembaran Negara RI Tahun 1967, No. 2818. Lembaga Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 1968. Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lembaran Negara RI Tahun 1968, No. 33. Jakarta.
3. Republik Indonesia. 1968. Keputusan Presiden No. 286 Tahun 1968 tentang Panitia Teknis Penanaman Modal. Departemen Penerangan. Jakarta.
4. Republik Indonesia. 1973. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Departemen Penerangan. Jakarta.
5. Republik Indonesia. 1977. Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Departemen Penerangan. Jakarta.
6. Republik Indonesia. 1981. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Republik Indonesia. 1982. Keputusan Presiden No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 33 tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.

8. Republik Indonesia. 1983. Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1983, No. 3263. Sekretariat Negara. Jakarta.
9. Republik Indonesia. 1985. Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.
10. Republik Indonesia. 1991. Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.
11. Republik Indonesia. 1993. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993. Sekretariat Negara. Jakarta.
12. Republik Indonesia. 1998. Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.
13. Republik Indonesia. 2001. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sekretariat Negara. Jakarta.
14. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.
15. Republik Indonesia. 2009. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
16. Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 90/SK/2007 jjs No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM. Jakarta.
17. Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 221. Sekretaris Kabinet. Jakarta.
18. Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Website Resmi Lembaga Negara

1. BKPM. 2018. Profil BKPM, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 13.26.
2. BKPM. 2018. Sejarah Waktu, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/sejarah-waktu>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 13.30.
3. BKPM. 2018. Profil Kepala, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-kepala>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 13.37.
9. BKPM. 2018. Visi & Misi, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/visi-misi>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 13.43.
10. BKPM. 2018. Tugas Pokok & Fungsi, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/tugas-pokok-dan-fungsi-bkpm>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 13.50.

11. BKPM. 2018. Struktur Organisasi, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/struktur-organisasi>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 14.03.
12. BKPM. 2018. Indonesia Investment Promotion Center (IIPC), <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/indonesia-investment-promotion-center-iipc>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 14.10.
13. BKPM. 2018. Penghargaan, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/prestasi>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 14.18.
14. BKPM. 2018. Pengembangan Sumber Daya Manusia, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/pengembangan-sumber-daya-manusia>, diakses pada 13 Agustus 2018, pukul 14.25.

D. Website Lainnya

1. Zulita Taufik. 2018. Logo BKPM Versus Logo Starbucks Coffee, <https://zulitaufik.wordpress.com/2011/01/12/bkpm-logo-vs-starbucks-coffee-logo/>, diakses pada 22 Mei 2018, 17.10.
2. Detik. 2008. BKPM Punya Simbol Baru, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1051292/bkpm-punya-simbol-baru>, diakses pada 30 Juli 2018, pukul 14.57.
3. Sinar Harapan. 2017. Swasta Nasional Berangsur-angsur Harus Ganti Modal Asing, <http://sinarharapan.net/2017/11/swasta-nasional-berangsur-angsur-harus-ganti-modal-asing/>, diakses pada 5 Juli 2018, pukul 14.50.
4. Sinar Harapan. 1973. BKPM Diharapkan Lebih Banyak Penanam Modal, <http://sinarharapan.net/2018/05/bkpm-diharapkan-lebih-banyak-penanam-modal/>, diakses pada 5 Juli 2018, pukul 15.00).
5. Merdeka. 1973. Presiden Lantik Pejabat-pejabat BKPM Membangun Harus Dengan Kekuatan Sendiri, <http://soeharto.co/presiden-lantik-pejabat2-bkpm-membangun-harus-dengan-kemampuan-sendiri>, diakses pada 5 Juli 2018, pukul 15.08.
6. Kompasiana. 2014. Mengapa Kepala BKPM Mahendra Ikut-ikutan Lepas Jabatan?, https://www.kompasiana.com/ibnupurna/mengapa-kepala-bkpm-mahendra-ikut-ikutan-lepas-jabatan_54f40849745513a12b6c8416, diakses pada 5 Juli 2018, pukul 15.47.
7. Mercuru Buana. 2015. Bab II: Badan Koordinasi Penanaman Modal, <http://digilib.mercubuana.ac.id/>, diakses pada 17 Juli 2017, pukul 13.56.
8. Historia. 2015. Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia, <https://historia.id/modern/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1>, diakses pada 14 Agustus 2017, pukul 16.24.
9. Riwan Sutandi. 2015. Penanaman Modal Asing Pada Masa Orde Baru, <http://httpriwansutandi.blogspot.com/2015/05/indonesia-pada-masa-orde-baru.html>, diakses pada 14 Agustus 2017, pukul 16.35.
10. Universitas Udayana. 2015. Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Ditinjau dari Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13131>, diakses pada 17 Juli, 2018 pukul 13.31.

11. Kontan, 2017. BKPM Reorientasi Demi Genjot Realisasi Investasi, <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-reorientasi-demi-genjot-realisasi-investasi>, diakses pada 3 Agustus 2018, pukul 15.35.
12. Neraca, 2017. BKPM Ingin Digitalisasi Dalam Layanan Investasi—Penanaman Modal, <http://www.neraca.co.id/article/89529/penanaman-modal-bkpm-ingin-digitalisasi-dalam-layanan-investasi>, diakses pada 3 Agustus 2018, pukul 15.55.
13. Liputan 6, 2017. Kejar Target Investasi, BKPM Bakal Restrukturisasi Organisasi, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2852706/kejar-target-investasi-bkpm-bakal-restrukturisasi-organisasi>, diakses pada 3 Agustus 2018, pukul 16.05.

E. Kepustakaan Lainnya

1. Erma Dewi Pujawati. 2000. *Pentingnya Pengembangan Strategi Promosi Peluang Investasi dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta.
2. Luna Destiana. 2011. *Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi di badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta.
3. Library of Congress Office. 1991. *Peranan BKPM dan Kebijaksanaan Penanaman Modal—1984*. Mikrofis 4525/PN/F/92, 11x15cm, Washington DC: Library of Congress Photoduplication Service.

F. Nara Sumber (Wawancara)

1. Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita, Kepala BKPM periode 1985–1988, pada 19 September 2017 pukul 12.00–13.00 WIB.
2. Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec., Kepala BKPM periode 2012–2013, pada 10 Oktober 2017 pukul 09.00–11.00 WIB.
3. Ir Yus'an, Wakil Kepala BKPM periode 2009–2010, pada 26 Juli 2018 pukul 08.00–08.45 WIB.
4. Retno Sulistiani, mantan karyawan BKPM periode 1980–2007, pada 21 Mei 2018 pukul 10.00–12.46 WIB.
5. Sukartini, mantan karyawan BKPM periode 1969–2007, pada 21 Mei 2018 pukul 10.00–12.46 WIB.
6. Irwan, mantan karyawan BKPM periode 1976–2005, pada 21 Mei 2018 pukul 10.00–12.46 WIB.
7. Beni, mantan karyawan BKPM periode 1976–2008, pada 21 Mei 2018 pukul 10.00–12.46 WIB.

